



**#BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# 2024 LKIP DISPERKIM KOTA DUMAI





PEMERINTAH KOTA DUMAI  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882,  
Laman : <http://perkim.dumaikota.go.id>, Post-el : [disperkimkd22@gmail.com](mailto:disperkimkd22@gmail.com)

---

SURAT PERNYATAAN  
KEBENARAN DATA LAPORAN LKIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHERMAN, S.Sos  
NIP : 19680715 199903 1 003  
Pangkat/Gol : PEMBINA TK.I / IV.b  
Jabatan : Kepala  
Unit Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota  
Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang dikirim melalui *link* sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 31 Desember 2024 yang bersumber pada:

1. Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. DPPA Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun Anggaran 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2024
4. Laporan SPJ Fungsional pada sistem SIPKD

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 20 Januari 2025  
Kepala,

**SUHERMAN, S.Sos**  
PEMBINA TK.I / IV.b  
NIP. 19680715 199903 1 003

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



**Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman**

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan Kinerja ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 20 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI,**

**SUHERMAN, S.Sos**

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19680715 199903 1 003

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pelaksana administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
  - Kepala Subbagian Tata Usaha
  - Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
  - Kelompok Jabatan Fungsional

3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPT

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas”** dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“Meningkatnya Infrastruktur Kota”**.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai 2021- 2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan, 1 (Sasaran) dengan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggung jawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel X.1** Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	%	75,72

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	%	55,73
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	71,43

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung dengan anggaran sebesar 14.452.948.162 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*) untuk melaksanakan 6 (*Enam*) Program Kerja antara lain :

**Tabel X.2** Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 680.000.000	APBD
2	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.857.440.212	APBD
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 1.600.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 1.843.296.250	APBD
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 100.000.000	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.271.917.500	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 14.452.948.162</b>	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 dengan anggaran sebesar 23.471.822.112,00 (*Dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*), sebagai berikut :

**Tabel X.3** Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 525.922.400	APBD
2	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.996.460.212	APBD, DAK
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 4.811.496.000	APBD, BANKEU
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 8.368.191.400	APBD, DAK
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 97.000.000,00	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.672.752.100	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 23.471.822.112,00</b>	

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel X.4** Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ATRIBUT
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	75,72%	65,07%	85,93%	Berhasil
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	55,73%	30,92%	55,49%	Cukup Berhasil
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	71,43%	64,29%	90%	Sangat Berhasil



Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori dua (2) yaitu Berhasil.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel X.5** Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>									
2	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	55,73	30,92	%	Rp3.996.460.212	Rp2.631.058.600,64	65,83%
		Menurunnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	45,50	45,50	%	Rp4.811.496.000	Rp2.335.325.084	48,54%
3	Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan	100	100	%	Rp525.922.400	Rp166.348.967	31,63%

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	71,43	64,29	%	Rp8.368.191.400	Rp6.785.273.094,50	81,08%
		Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	60	60	%	Rp97.000.000	Rp96.765.680	99,76%

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel X.6** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	85,93	72,84
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	55,49	56,39
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100	31,63
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	90	81,30

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman tingkat efisiensinya adalah 1,17 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (85,93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (72,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh tingkat efisiensinya adalah 0,98 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (55,49%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,39%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota tingkat efisiensinya adalah 3,16 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (31,63%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU tingkat efisiensinya adalah 1,10 berasal dari perhitungan

persentase capaian kinerja tahun 2024 (90%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,30%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISRA EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Isu Strategis .....	5
1.5 Cascading Kinerja .....	6
1.6 Peta Proses Bisnis .....	9
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI .....	12
2.1 Rencana Strategis.....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	14
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program .....	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI .....	20
A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	20
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	22
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	24
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra .....	29
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional (Target SPM).....	31
3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi.....	31
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	43



3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.8 Prestasi dan Penghargaan.....	46
B. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Langkah Perbaikan.....	52
LAMPIRAN.....	xvii
1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	xviii
2. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	xix
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	xx
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta Lampiran Perubahan.....	lxviii
5. Pengukuran Kinerja.....	cxvi
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024.....	cxvii

# DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 .....	xviii
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	xix
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	xx
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta Lampiran Perubahan .....	lxviii
5. Pengukuran Kinerja .....	cxvi
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024 .....	cxvii

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	6
<b>Tabel 1.2</b> Matriks Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	9
<b>Tabel 1.3</b> Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	10
<b>Tabel 2.1</b> Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 .....	15
<b>Tabel 2.2</b> Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 .....	16
<b>Tabel 2.3</b> Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	18
<b>Tabel 2.4</b> Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 .....	18
<b>Tabel 2.5</b> Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	19
<b>Tabel 2.6</b> Program Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 .....	19
<b>Tabel 3.1</b> Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	21
<b>Tabel 3.2</b> Atribut Capaian Indikator Kinerja .....	22
<b>Tabel 3.3</b> Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	24
<b>Tabel 3.4</b> Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional .....	31
<b>Tabel 3.5</b> Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Dumai .....	35
<b>Tabel 3.6</b> Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	43
<b>Tabel 3.7</b> Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	45
<b>Tabel 3.8</b> Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024 .....	46

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	4
<b>Gambar 1.2</b> Cascading Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	7
<b>Gambar 1.3</b> Pohon Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	8
<b>Gambar 2.1</b> Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai .....	13
<b>Gambar 3.1</b> Grafik Pengurangan Kumuh Kota Dumai s.d 2024 .....	33
<b>Gambar 3.2</b> Bantuan Rumah Layak Huni di Jl. Sentosa, Kec. Bukit Kapur.....	36
<b>Gambar 3.3</b> Bantuan Rumah Layak Huni di Kel. Purnama, Kec. Duma Barat .....	36
<b>Gambar 3.4</b> Bantuan Rumah Layak Huni di Kel. Purnama, Kec. Duma Barat .....	36
<b>Gambar 3.5</b> Bantuan Rumah Layak Huni di Kel. Purnama, Kec. Duma Barat .....	36
<b>Gambar 3.6</b> Dokumen DED Kumuh Kota Dumai Kawasan Bintan .....	37
<b>Gambar 3.7</b> Dokumen DED Kumuh Kota Dumai Kawasan Tanjung Palas.....	37
<b>Gambar 3.8</b> Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan .....	39
<b>Gambar 3.9</b> Grafik Peningkatan Infrastruktur PSU .....	40
<b>Gambar 3.10</b> Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Kenari I Gg. H. Zul, Kel. STDI.....	40
<b>Gambar 3.11</b> Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Hidayah Perumahan Fajar Indah Permai II, Kel. Tanjung Palas .....	41
<b>Gambar 3.12</b> Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Samudra Gg. Pasifik I, Kel. Purnama	41
<b>Gambar 3.13</b> Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Perumahan Sri Mersing Residence 4, Kel. Purnama .....	41
<b>Gambar 3.14</b> Dokumen Gambar Kerja Perspektif (DED) PSU Kota Dumai .....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
5. Pelaksana administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

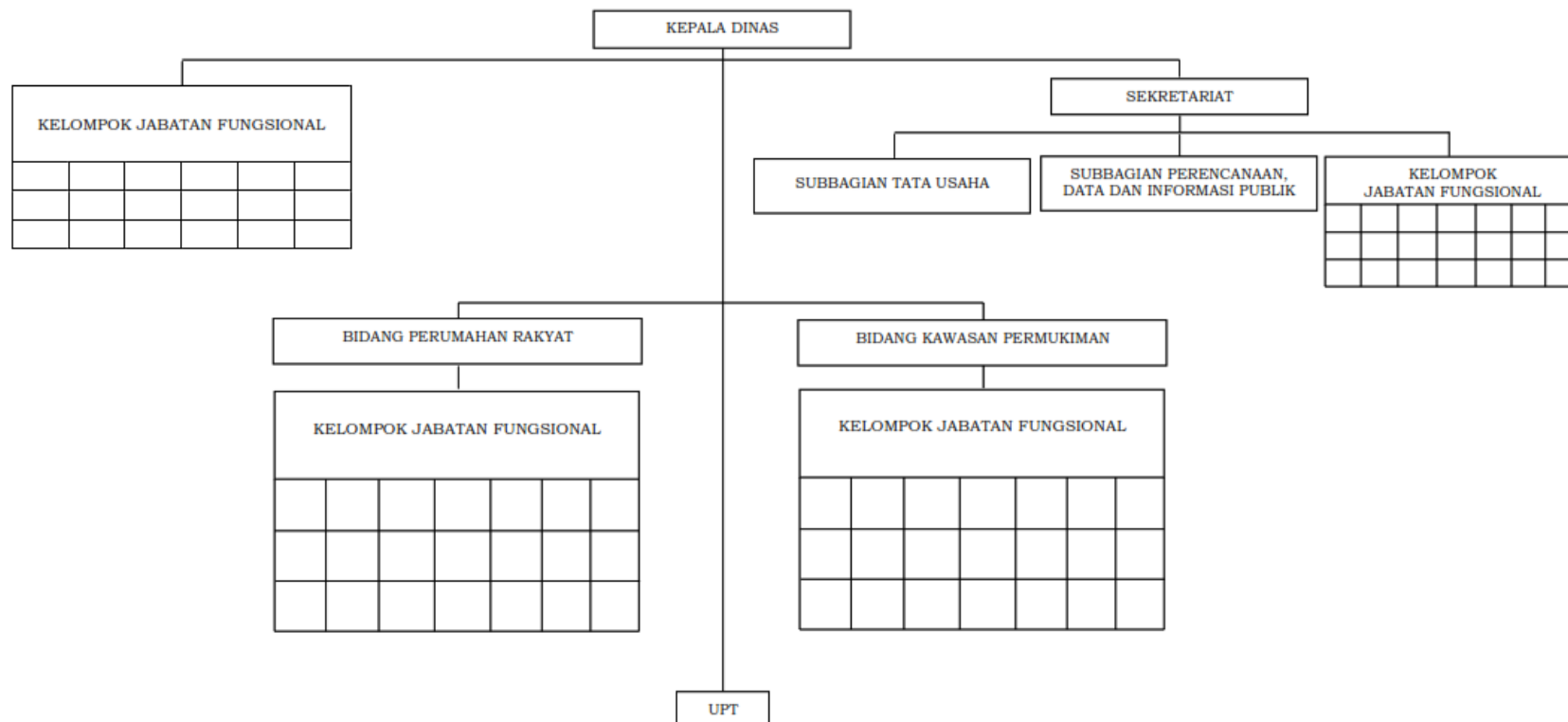
Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
  - Kepala Subbagian Tata Usaha
  - Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
  - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPT

**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan:

- 1.3.1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

### 1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, permasalahan yang timbul berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berdasarkan RPJMD dan Renstra sebagai berikut:

1. Rendahnya akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.
2. Perlunya peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan prasarana, sarana dan utilitas umum pada perumahan dan kawasan permukiman.
3. Perlunya pengurangan dan penataan kawasan kumuh.
4. Perlunya penguatan penanggulangan/fasilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk menjabarkan dan mencari simpul dari permasalahan yang telah menghambat/menghalangi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Penjabaran

permasalahan pokok dalam pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

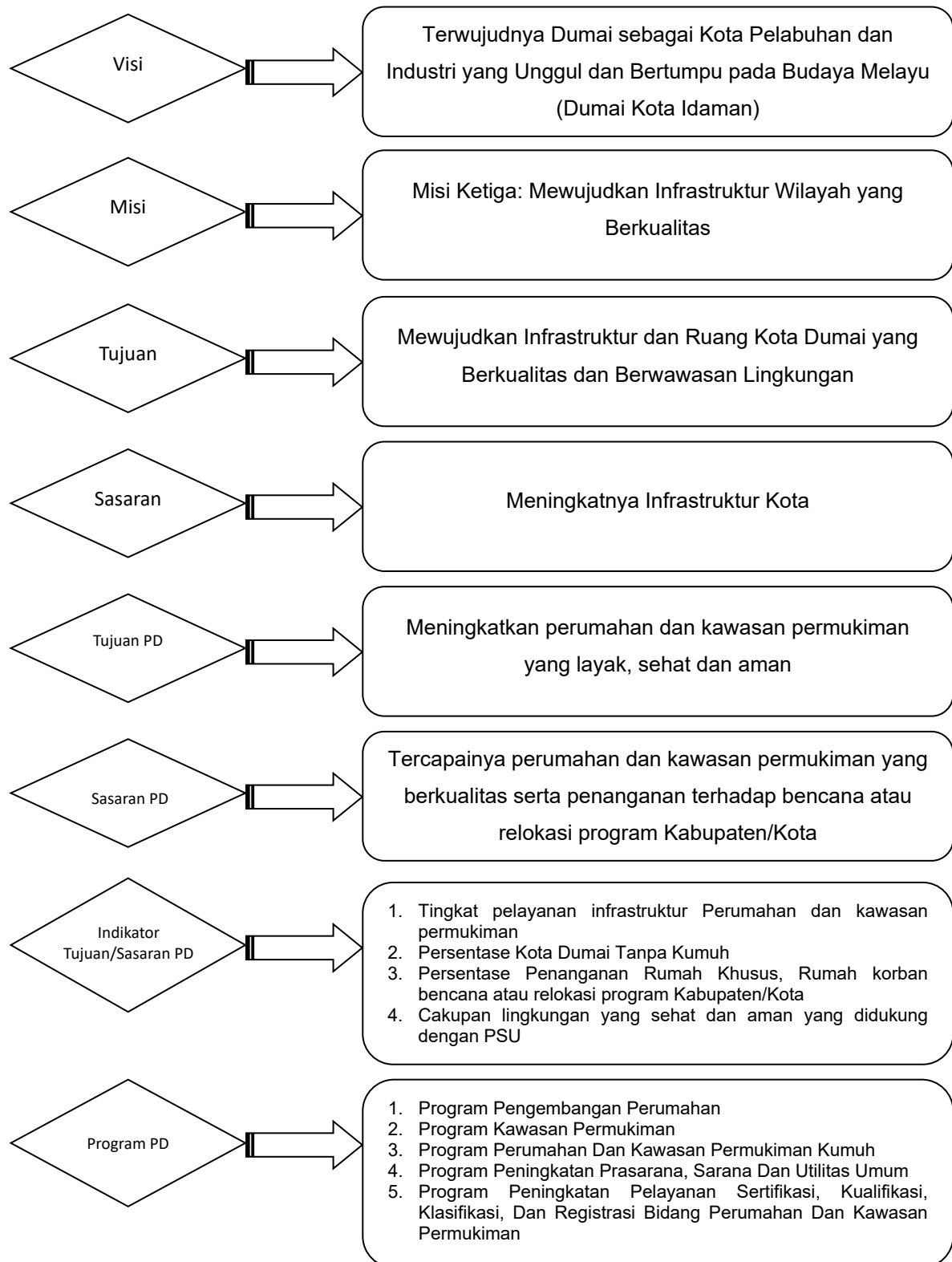
**Tabel 1.1** Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	1.1 Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	1.1.1 Terbatasnya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
2	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	2.1 Luasnya permukiman yang memerlukan infrastruktur dasar yang layak 2.2 Jangkauan penyediaan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh	2.1.1 Besarnya jumlah permukiman yang belum mendapat layanan infrastruktur dasar 2.2.1 Masih belum meratanya cakupan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum yang dibangun
3	Masih terdapatnya luasan kawasan kumuh di Kota Dumai	3.1 Kawasan kumuh	3.1.1 Luasnya permukiman kumuh 3.1.2 Pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang belum terencana dan teratur

### 1.5 Cascading Kinerja

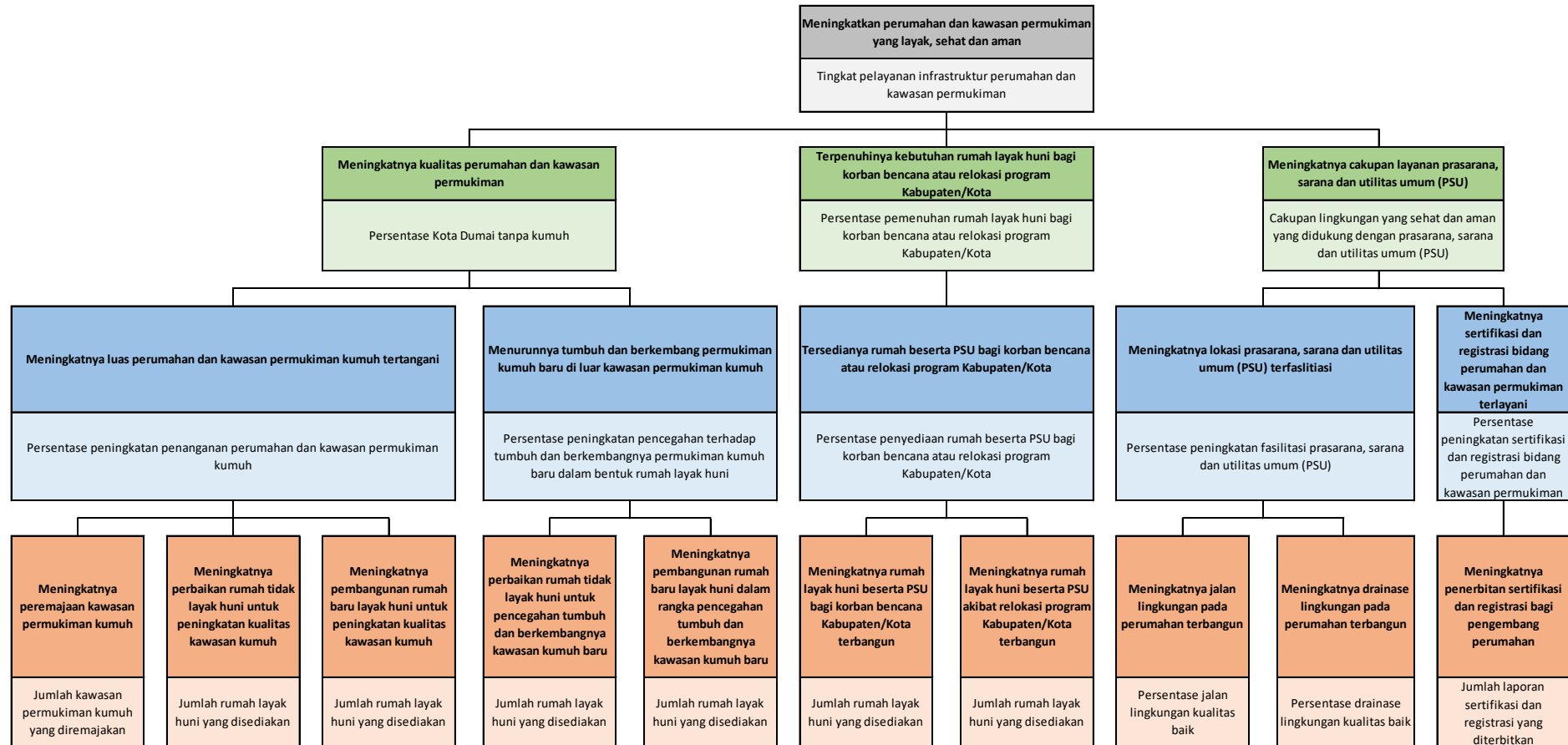
Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar 1.2** Cascading Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai



**Gambar 1.3** Pohon Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

**POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI**



## 1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

**Tabel 1.2** Matriks Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

PROSES BISNIS/sasaran		SUB PROSES BISNIS/strategi		Peta Lintas Fungsi	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
PKP 01	Tercapainya penanganan terhadap rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang optimal	PKP 01.01	Melaksanakan penyediaan bantuan rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PKP 01.01.01	Pendataan rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
				PKP 01.01.02	Sosialisasi dan persiapan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
				PKP 01.01.03	Pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
				PKP 01.01.04	Serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
PKP 02	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	PKP 02.01	Mengoptimalkan tertib administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	PKP 02.01.01	Penerbitan regulasi atau kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
				PKP 02.01.02	Registrasi bagi orang atau badan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum
		PKP 02.02	Menurunkan nilai deliniasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh	PKP 02.02.01	Perencanaan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
				PKP 02.02.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
				PKP 02.02.03	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
				PKP 02.02.04	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota



PROSES BISNIS/sasaran		SUB PROSES BISNIS/strategi		Peta Lintas Fungsi	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
PKP 03	Tercapainya prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	PKP 03.01	Melaksanakan penyediaan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	PKP 03.01.01	Perencanaan penyediaan PSU perumahan
				PKP 03.01.02	Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
				PKP 03.01.03	Operasional dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan

**PROSES PENDUKUNG**

- PKP 05 Perencanaan Strategis
- PKP 06 Penganggaran
- PKP 07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset

**PROSES LAINNYA**

- PKP 08 Audit Mutu Internal (Evaluasi Hasil Kinerja)

### 1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1305.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

**Tabel 1.3** Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut				
		Uraian	Output	Target Waktu selesai	Penanggung Jawab	Praktik-praktik Yang Sudah ada tapi Belum Optimal
1.	Melampirkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	SOP Pengumpulan Data Kinerja dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KIOhQhEA9yAoLlauHQvR9Z5VAJjdEz4L?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KIOhQhEA9yAoLlauHQvR9Z5VAJjdEz4L?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut				
		Uraian	Output	Target Waktu selesai	Penanggung Jawab	Praktik-praktik Yang Sudah ada tapi Belum Optimal
2.	Melampirkan Setiap Pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Seluruh pegawai Disperkim telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan pada SKP tahun 2023	Evaluasi kinerja pegawai Disperkim tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KlcAVHNGcJA8eeFEsU5GaFwM36BqHdZq?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KlcAVHNGcJA8eeFEsU5GaFwM36BqHdZq?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai <i>Pegawai Disperkim telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan pada SKP tahun 2023</i>
3.	Melampirkan Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	Pengukuran Kinerja akan menjadi dasar dalam pemberian TPP Tahun 2024 seluruh PNS di Disperkim	Lembar Penilaian Pembayaran TPP ASN Tahun 2024 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_q9X9sOFLkXPmKbOz8UYTdkIRKF0UFVd?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_q9X9sOFLkXPmKbOz8UYTdkIRKF0UFVd?usp=drive_link</a>	15 Maret 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai <i>Pembayaran TPP tahun 2024 telah dilengkapi dengan Lembar Penilaian Pembayaran TPP</i>
4.	Melampirkan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	Disperkim telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh APIP pada LHE tahun sebelumnya.	Tindak lanjut atas seluruh rekomendasi LHE SAKIP internal Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai
5.	Melampirkan terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	Dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan, terjadi peningkatan implementasi SAKIP di internal Disperkim	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai
6.	Melampirkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Rekomendasi yang diberikan oleh APIP pada LHE Tahun 2023 telah ditindaklanjuti dengan baik sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP di internal Disperkim	Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh APIP pada LHE Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai
7.	Melampirkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Rekomendasi APIP yang dituangkan di dalam LHE tahun 2023 telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja Disperkim.	Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh APIP pada LHE Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai
8.	Melampirkan terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh APIP pada LHE Disperkim Tahun 2023 telah terjadi peningkatan kinerja di internal Disperkim	Rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi APIP pada hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KJCIN3K77ySOqpSyq7LGVV6ogBGdRXal?usp=drive_link</a>	20 Februari 2024	Sekretariat Dinas Perumahan dan Permukiman	Output sudah tercapai

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

### KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, risiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua”.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun ke depan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Ke pelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Ke pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

**Gambar 2.1** Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai



## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, di mana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.1** Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI		
TujuanRPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	TujuanRenstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman
					Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh
					Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota
					Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

### 2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024

<b>VISI:</b> Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
<b>MISI ke 3:</b> Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengembangan perumahan dan penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
		Meningkatkan kualitas pengembangan kawasan permukiman	Penerbitan Izin/regulasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

<b>VISI:</b> Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
<b>MISI ke 3:</b> Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Pengurangan luasan delineasi perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
			Pembangunan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2. 3** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman</i>
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut

**Tabel 2.4** Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	%	75,72
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	%	55,73
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	71,43

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar 14.452.948.162 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*) untuk melaksanakan 6 (enam) Program Kerja antara lain:

**Tabel 2.5** Program Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 680.000.000	APBD
2	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.857.440.212	APBD
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 1.600.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 1.843.296.250	APBD
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 100.000.000	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.271.917.500	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 14.452.948.162</b>	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 28 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 dengan anggaran sebesar 23.471.822.112,00 (*Dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*), sebagai berikut:

**Tabel 2.6** Program Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 525.922.400	APBD
2	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.996.460.212	APBD, DAK
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 4.811.496.000	APBD, BANKEU
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 8.368.191.400	APBD, DAK
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 97.000.000,00	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.672.752.100	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 23.471.822.112,00</b>	

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

### KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No. 29 Tahun 2014).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel 3.1** Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :  $\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :  $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

**Tabel 3.2** Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	<b>Sangat Berhasil</b>
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	<b>Berhasil</b>
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	<b>Cukup Berhasil</b>
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	<b>Tidak Berhasil</b>

### 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

#### a. Indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Capaian kinerja** untuk indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 75,72% realisasi sebesar 65,07%, tercapai 85,93% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 54% atau tercapai sebesar 72%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 13,93%.

Efisiensi Anggaran	67,50%
Nilai Anggaran	Rp 17.799.070.012
Capaian 2024	85,93%
Target	75,72%
Realisasi	65,07%

#### b. Indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh

**Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 55,73% realisasi sebesar 30,92%, tercapai 55,49% atau bernilai kinerja Cukup Berhasil (rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 11,47% atau tercapai sebesar 35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 20,49%.

Efisiensi Anggaran	65,83%
Nilai Anggaran	Rp 3.996.460.212
Capaian 2024	55,49%
Target	55,73%
Realisasi	30,92%

**c. Indikator Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**

**Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap.

Efisiensi Anggaran	31,63%
Nilai Anggaran	Rp525.922.400
Capaian 2024	100%
Target	100%
Realisasi	100%

**d. Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

**Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 71,43% realisasi sebesar 64,29%, tercapai 90,00% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 50% atau tercapai sebesar 82%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 8%.

Efisiensi Anggaran	81,30%
Nilai Anggaran	Rp 8.465.191.400
Capaian 2024	90,00%
Target	71,43%
Realisasi	64,29%

### 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3** Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	-	64,77%	75,72%	-	54%	65,07%	-	72%	85,93%
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	22,7%	33,60%	55,73%	88%	11,47%	30,92%	>100%	35%	55,49%
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	35,2%	60,71%	71,43%	80%	50%	64,29%	>100%	82%	90%
2.	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Persentase penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda, dan masyarakat	20%	-	-	20%	-	-	100%	-	-

*Keterangan: Target dan capaian IKU tahun 2023 dan tahun 2024 dihitung berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perkim Tahun 2021-2026 yang disusun pada Februari tahun 2024. Pada tahun 2023 Bidang Pertanahan tidak lagi menjadi bagian dari Dinas Perkim*

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh

IKU Persentase Kota Dumai tanpa kumuh berasal dari perhitungan *Luasan permukiman kumuh yang tertangani* dibagi dengan *Luas permukiman kumuh* dikali 100%.

- a. Pada tahun 2022, target IKU Persentase Kota Dumai tanpa kumuh adalah 22,7%. Luas permukiman kumuh Kota Dumai yaitu 28,24 Ha dan luasan permukiman kumuh yang tertangani yaitu 24,85 Ha. Realisasi IKU pada tahun 2022 yaitu 87,99% dengan capaian 388%.
- b. Pada Tahun 2023 di Kota Dumai tidak terjadi pengurangan kumuh diakibatkan perubahan kebijakan pusat atas dana DAK pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luasan di bawah 10 Ha yang merupakan kegiatan inti dalam pengurangan Kumuh (Perbaikan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh) dialihkan menjadi pola integrasi, sehingga realisasi pada IKU ini senilai 11,47% dengan persentase capaian senilai 35%. Pada tahun dimaksud kegiatan diprioritaskan untuk melaksanakan pencegahan kawasan kumuh (Pembangunan Rumah Layak Huni 65 Unit di luar kawasan kumuh di mana kegiatan ini tidak mengurangi nilai kumuh, namun mencegah kumuh baru muncul).
- c. Pada Tahun 2024 berdasarkan pleno pengurangan luasan kumuh kota Dumai menetapkan pengurangan kumuh kota Dumai tahun 2024 sebanyak 67,02 Ha dari total 216,73 Ha dengan persentase realisasi 30,92% dan capaian 55,49%, melalui intervensi Peremajaan Kawasan Kumuh, Pembangunan Baru Rumah Layak Huni guna Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 30,92% atau tercapai sebesar 55,49% maka capaian di tahun 2024 meningkat.

Efisiensi Anggaran	65,83%	➔	Perbandingan realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	
Nilai Anggaran	Rp 3.996.460.212		Realisasi 2023	Realisasi 2024 lebih baik
Capaian 2024	55,49%		11,47%	30,92%
Target	55,73%		Capaian 2023	Capaian 2024 lebih baik
Realisasi	30,92%		35%	55,49%

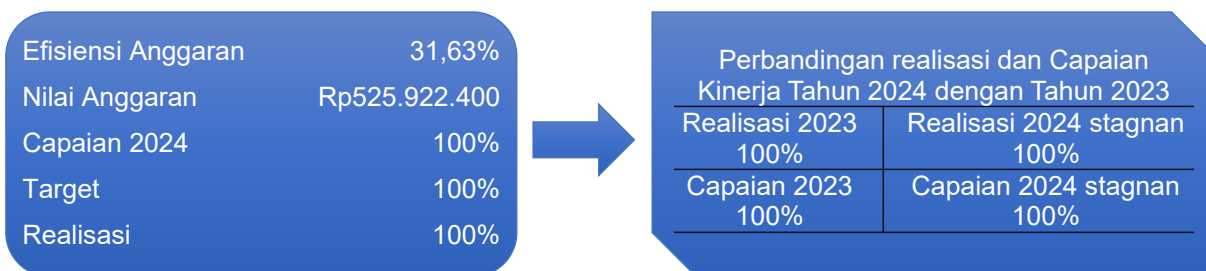


## 2. IKU Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

IKU Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota berasal dari perhitungan *Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi* dibagi dengan *Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu* dikali 100%.

- a. Pada tahun 2022, target IKU Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah 100%. Pada tahun 2022 tidak terjadi bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota di Kota Dumai. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melaksanakan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota. Realisasi IKU pada tahun 2022 yaitu 100% dengan capaian 100%.
- b. Pada tahun 2023 tidak terjadi bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 maupun program relokasi pemerintah Kabupaten Kota, sehingga menurut amanat dari Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 perlu dilakukan pendataan dan identifikasi yang telah dilaksanakan dengan capaian 100%.
- c. Pada tahun 2024 tidak terjadi bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota di Kota Dumai. Namun, sebagai langkah pemenuhan SPM Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah dilakukan
  - 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - 2) Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
  - 3) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
  - 4) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100% maka capaian tahun 2024 stagnan.

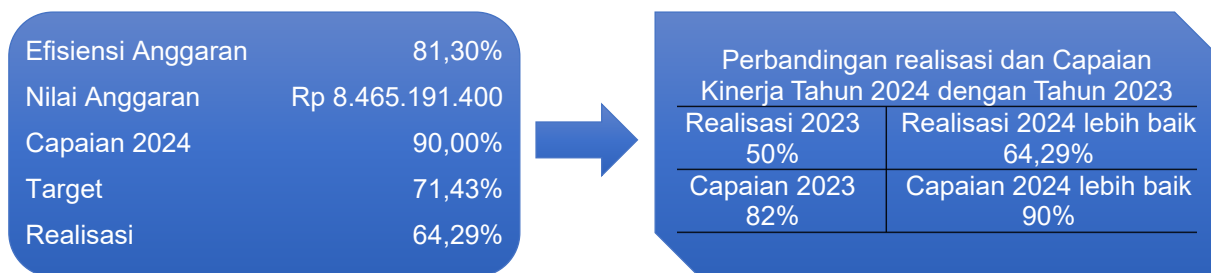


### 3. IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU berasal dari perhitungan *Jumlah lingkungan yang didukung PSU* dibagi dengan *Jumlah lingkungan perumahan* dikali 100%.

- a. Pada tahun 2022, target IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah 35,2%. Pada variabel Jumlah lingkungan yang didukung PSU terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) sebanyak 20 lokasi, dibagi dengan Jumlah lingkungan perumahan yang direncanakan pada dokumen Renstra yaitu 25 lokasi. Realisasi IKU pada tahun 2022 yaitu 80% dengan capaian 227%.
- b. Pada tahun 2023, pada Variabel Jumlah lingkungan yang didukung PSU terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan sebanyak 14 lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan, dibagi dengan Jumlah lingkungan perumahan sebanyak 28 Perumahan yang direncanakan pada dokumen Perubahan Renstra, sehingga realisasi terhadap target IKU sebesar 50% dari dengan nilai capaian sebesar 82% bernilai kinerja memuaskan.
- c. Pada tahun 2024, terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di kawasan perumahan sebanyak 18 lokasi dengan asumsi setiap lokasi dihitung per RT pada kawasan perumahan yang dibangun dengan realisasi terhadap target IKU sebesar 64,29% dari 71,43% dengan capaian sebesar 90%.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 64,29% dengan nilai capaian sebesar 90% maka capaian tahun 2024 meningkat.

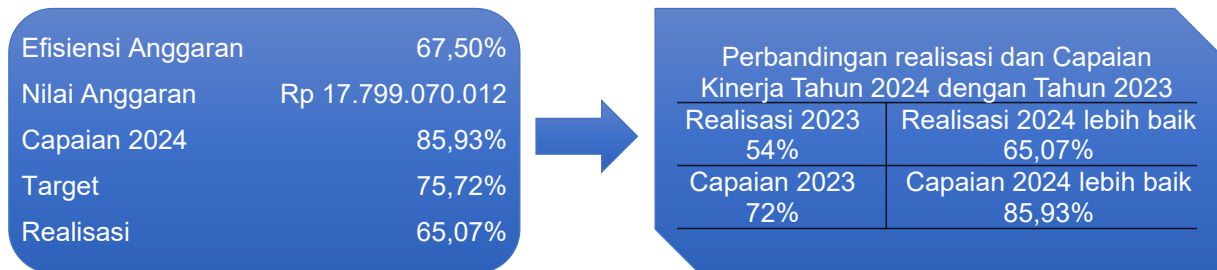


### 4. IKU Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

IKU Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman berasal dari perhitungan *Indikator Persentase Kota Dumai tanpa kumuh* ditambah *Indikator Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi*

program Kabupaten/Kota ditambah Indikator *Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU* dibagi 3. IKU ini terdapat di dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang disusun pada Februari tahun 2024, sehingga tidak ada target dan realisasi IKU ini pada tahun 2022.

- a. Pada tahun 2023, target IKU Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 64,77%. Dari perhitungan IKU yang telah dilaksanakan didapat realisasi pada tahun 2023 yaitu 54% dengan capaian 72%.
- b. Pada tahun 2024, target IKU Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 75,72%. Dari perhitungan IKU yang telah dilaksanakan, realisasi pada tahun 2024 yaitu 65,07% dengan capaian 85,93%.



### 5. IKU Persentase penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda, dan masyarakat

IKU Persentase penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda, dan masyarakat berasal dari perhitungan *Jumlah kasus yang diselesaikan* dibagi dengan *Jumlah kasus yang terdaftar* dikali 100%. Pada tahun 2023, Bidang Pertanahan tidak lagi menjadi bagian dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Oleh karena itu, IKU ini hanya ada di tahun 2022.

- a. Pada tahun 2022, target IKU Persentase penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda, dan masyarakat adalah 20%. Jumlah kasus yang diselesaikan yaitu 5 kasus dari yang direncanakan sebanyak 25 kasus. Realisasi IKU pada tahun 2022 yaitu 20% dengan capaian 100%.

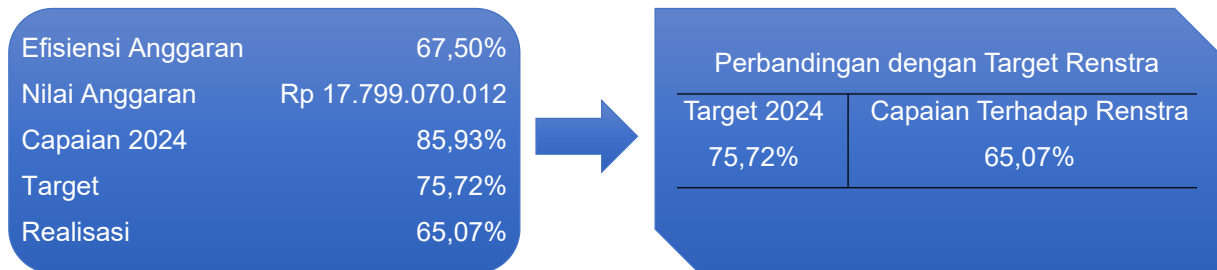
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) tahun 2024 termasuk kategori dua (2) yaitu BERHASIL.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu:

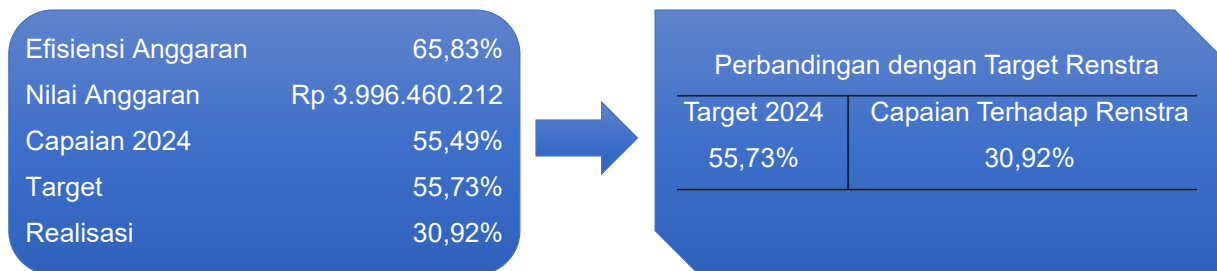
#### a. Indikator Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman tahun 2024 masih kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 75,72% dan terealisasi 65,07% pada tahun 2024.



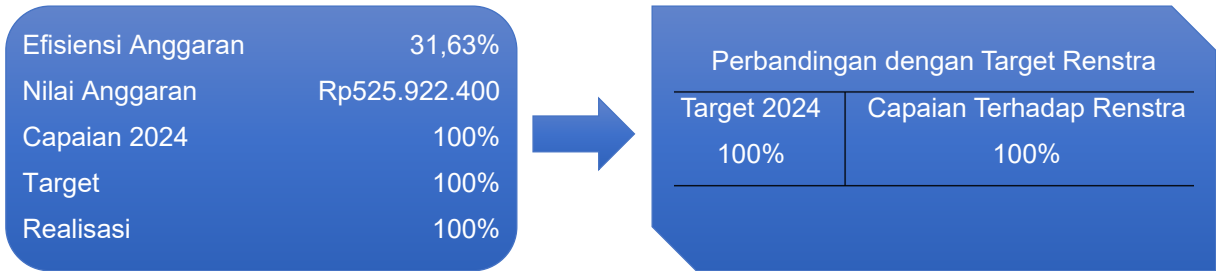
#### b. Indikator Persentase Kota Dumai tanpa kumuh

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Kota Dumai tanpa kumuh tahun 2024 masih kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 55,73% dan terealisasi 30,92% pada tahun 2024.



#### c. Indikator Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 100% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.



**d. Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU tahun 2024 masih kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 71,43% dan terealisasi 64,29% pada tahun 2024.



Upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh:  
 Mempersiapkan Usulan Pengentasan Kawasan Kumuh Terintegrasi pada Kementerian PUPR. Pada tahun 2025 Kota Dumai berhasil mendapatkan DAK Integrasi Pengentasan Kawasan Kumuh
2. Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota:  
 Melakukan Persiapan untuk menghadapi pemberian batuan bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota dengan
  - a. Melakukan Identifikasi Rumah bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota dengan
  - b. Melakukan Identifikasi Lahan Potensial bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota dengan

- c. Mempersiapkan pagu anggaran pada dokumen perencanaan
- 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan SU:
  - a. Mengakomodir dan memprioritaskan usulan kebutuhan masyarakat
  - b. Mempercepat Serah Terima PSU dari Pengembang kepada Pemko Dumai

### 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4** Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISAS I 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	100%	100%	Pencapaian SPM Perumahan Rakyat diamanatkan tercapai 100% dalam kondisi ada atau tidak adanya bencana alam. Di Kota Dumai pada tahun 2024 tidak terjadi bencana alam sehingga dilakukan Pembangunan Rumah Korban Bencana Tahun sebelumnya yang telah ter data, pembuatan Dokumen Identifikasi Perumahan, Dokumen Identifikasi Lahan Potensial, dan DED Perumahan bagi korban bencana untuk mencapai target SPM dengan realisasi 100%.
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	100%	100%	

### 3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

#### 1. Indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 75,72%. IKU ini merupakan rata-rata dari tiga IKU inti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan IKU ini yakni:

Persentase Kota Dumai tanpa kumuh + Persentase penanganan rumah khusus,  
rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota +  
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

3

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 65,07%, tercapai 85,93% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil (tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 54% atau tercapai sebesar 72%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 13,93%.

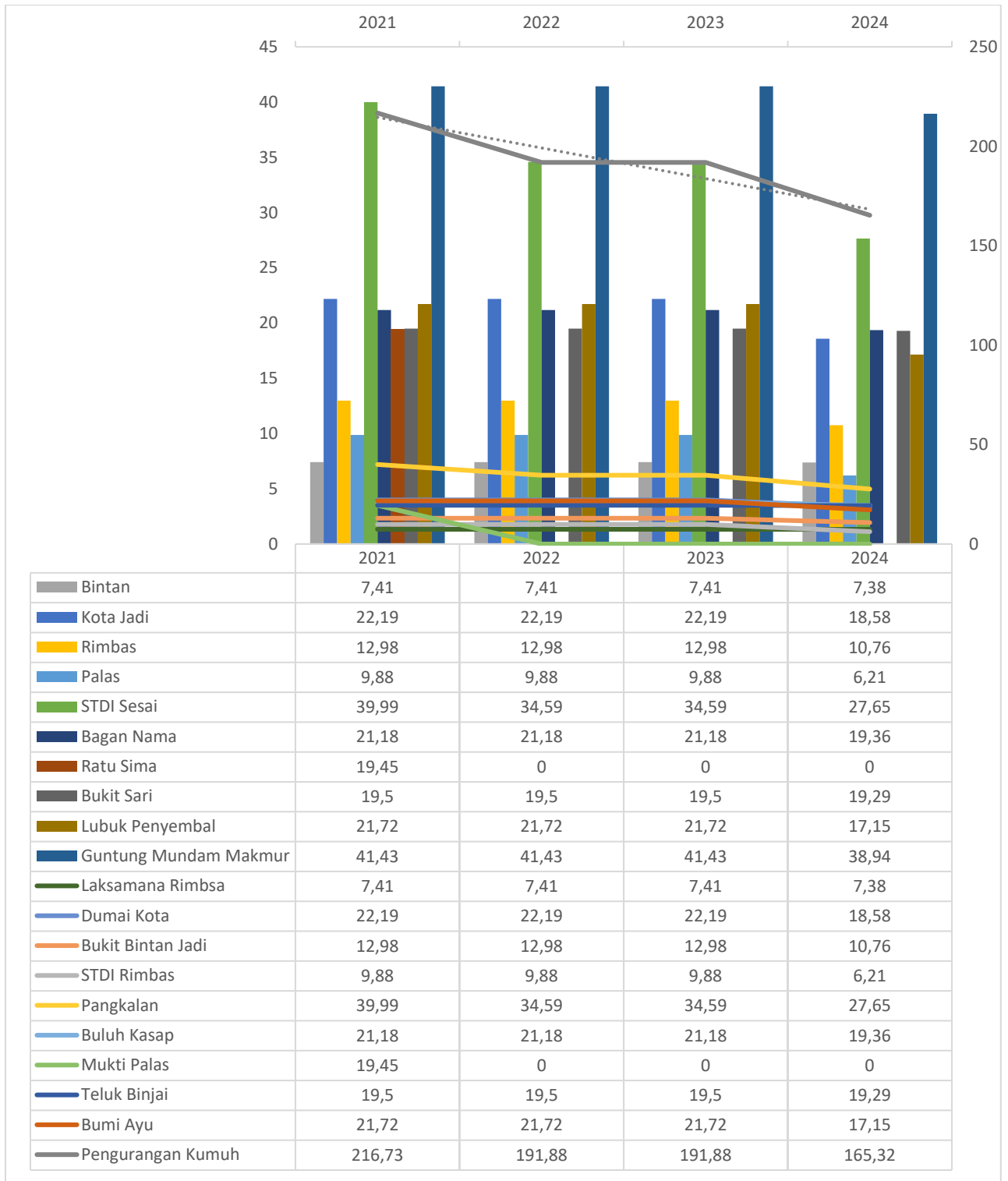
Faktor pendukung/pendorong capaian indikator, Faktor penghambat Capaian Indikator dan Tindak lanjut Capaian Indikator pada IKU Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari semua faktor-faktor yang terdapat pada ketiga IKU pembentuk formulasi IKU Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## 2. Indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 55,73%. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan IKU ini yakni:

$$\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$$

Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2024 seluas 67,02 Ha (Berdasarkan Pleno Kumuh Tahun 2024). Luas permukiman kumuh di tahun 2024 (berdasarkan Target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026) seluas 216,73 Ha sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 30,92% dengan capaian 55,49% bernilai kinerja Cukup Berhasil (rendah). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 11,47% atau tercapai sebesar 35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 20,49%.



**Gambar 3.1** Grafik Pengurangan Kumuh Kota Dumai s.d 2024  
 Sumber: Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Dumai, 2024



**b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh adalah sebagai berikut:

- Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam mengentaskan kawasan Kumuh Kota Dumai dengan memaksimalkan program yang ada dari berbagai sumber pendanaan (DAK);
- Antusiasme dan dukungan Masyarakat dalam melaksanakan pengentasan kawasan kumuh Kota Dumai Khususnya Bantuan Rumah Layak Huni;
- Sumber daya yang memadai.

**c. Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh adalah sebagai berikut:

- Perubahan Regulasi pendanaan di tengah-tengah rencana strategis berjalan;
- Bertambahnya Luasan Kumuh pada SK Kumuh dan Potensi Munculnya Kawasan Kumuh Baru di luar kawasan kumuh yang di tangani di tahun berkenaan.

**d. Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh adalah sebagai berikut:

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan kegiatan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh), sebanyak 70 Unit Rumah di 7 Kecamatan;
- Memaksimalkan pendanaan kegiatan kumuh dari sumber dana DAK.

**Tabel 3.5** Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Dumai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	2020			2021			2022			2023			2024								
			APBD PROV	DAK	BSPS	DAK	DAK SILPA	BSPS	BANKEU PROV	DAK	BSPS	BANKEU PROV	DBH	APBD	BSPS	BANKEU PROV	DAK	APBD					
1	Dumai Kota	1 Rimba Sekampung		22					50										2				
		2 Dumai Kota												2						2			
		3 Laksamana					10					1								2			
		4 Sukajadi		22																2			
		5 Bintan																		12			
2	Dumai Timur	1 Jaya Mukti		22							10								1	1			
		2 Tanjung Palas		20					15		10		4						7	15			
		3 Buluh Kasap		20	20															2	10		
		4 Bukit Batrem			20					4									3				
		5 Teluk Binjai																					
3	Dumai Barat	1 Purnama					13				4	1	1						1	4			
		2 Bagan Keladi								3			2								2		
		3 Simpang Tetap Darul Ikhsan					20				40										1		
		4 Pangkalan Sesai					18			9	46		1						1	25			
4	Dumai Selatan	1 Bukit Datuk					20				56									1			
		2 Bumi Ayu									50												
		3 Mekar Sari			20	17						3	1	2									
		4 Bukit Timah	3		20																1		
		5 Ratu Sima			20						56	21	1		1	15	1				1		
5	Bukit Kapur	1 Bagan Besar	3							2		1	1						1	2	1		
		2 Bukit Kayu Kapur			20						3		1							6		1	
		3 Bukit Nenas	3										10									1	
		4 Gurun Panjang			20								17	3			3	2					
		5 Kampung Baru	3		20								12	3		1	4				1	1	
		6 Bagan Besar Timur								1		9	1								4	1	
		7 Bukit Kapur										3	1										
6	Medang Kampai	1 Pelintung	4										1								1		
		2 Guntung		22																	5		
		3 Teluk Makmur			20																12		1
		4 Mundam			20																17	2	
7	Sungai Sembilan	1 Lubuk Gaung					22			3	50	17	7							8	1		
		2 Bangsal Aceh								3		30	13							6			
		3 Tanjung Penyembal								8		29	3							37	3		
		4 Basilam Baru										34	3		1					78	3	1	
		5 Batu Teritip										10	2										
		6 Sungai Geniot									2		20			1	3				10		2
<b>TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>128</b>	<b>200</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>348</b>	<b>248</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>213</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>64</b>					

Sumber: Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perkim Kota Dumai, 2024



**Gambar 3.2** Bantuan Rumah Layak Huni di Jl. Sentosa, Kec. Bukit Kapur  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*



**Gambar 3.3** Bantuan Rumah Layak Huni di Kel. Purnama, Kec. Duma Barat  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*



**Gambar 3.4** Bantuan Rumah Layak Huni di Kel. Purnama, Kec. Duma Barat  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*

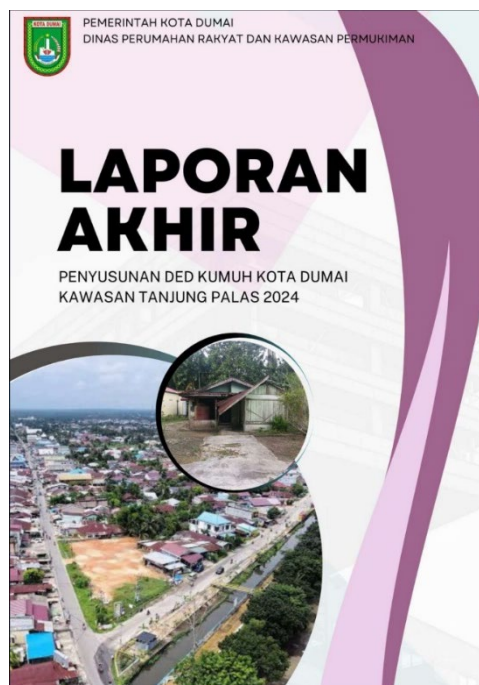


**Gambar 3.5** Bantuan Rumah Layak Huni di Kel. Purnama, Kec. Duma Barat  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan Penyusunan DED Kumuh untuk mengetahui Luasan Kumuh yang secara detail serta berapa anggaran yang diperlukan untuk mengatasi kumuh Kota Dumai yang tersisa.



**Gambar 3.6** Dokumen DED Kumuh Kota Dumai Kawasan Bintan  
*Sumber: Arsip Dinas Perkim, 2024*



**Gambar 3.7** Dokumen DED Kumuh Kota Dumai Kawasan Tanjung Palas  
*Sumber: Arsip Dinas Perkim, 2024*

- Pengentasan kumuh Kota Dumai.

### 3. Indikator Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan IKU ini yakni:

$$\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$$

Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap/stagnan. Pada tahun 2024 tidak terjadi bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 maupun program relokasi pemerintah Kabupaten Kota, sehingga menurut amanat dari Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 perlu dilakukan pendataan dan identifikasi yang telah dilaksanakan dengan capaian 100%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam melaksanakan Penanganan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota;
- Penanganan Rumah bagi korban bencana dan relokasi program Kabupaten/Kota merupakan SPM Perumahan Rakyat;
- Sumber daya yang memadai.

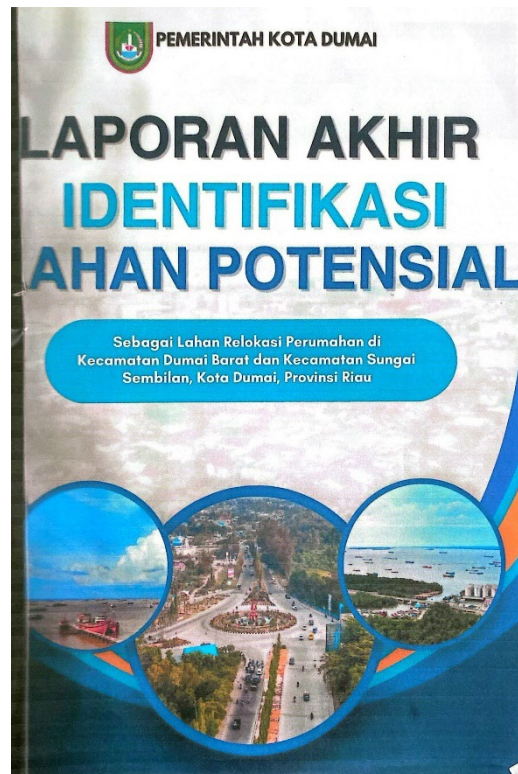
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Adanya perbedaan regulasi terkait penanganan rumah korban bencana antara BNPB dan SPM PUPR yaitu bencana kebakaran, banjir, bukan merupakan bencana alam sehingga tidak/belum dapat di intervensi.

- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota di Kecamatan Dumai Selatan sebagai upaya pemenuhan SPM dan menginventarisasi rumah-rumah yang berpotensi terkena bencana untuk Tahun mendatang.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan pembangunan Rumah bagi korban bencana kebakaran yang telah terjadi di tahun sebelumnya.



**Gambar 3.8** Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

*Sumber: Arsip Dinas Perkim, 2024*

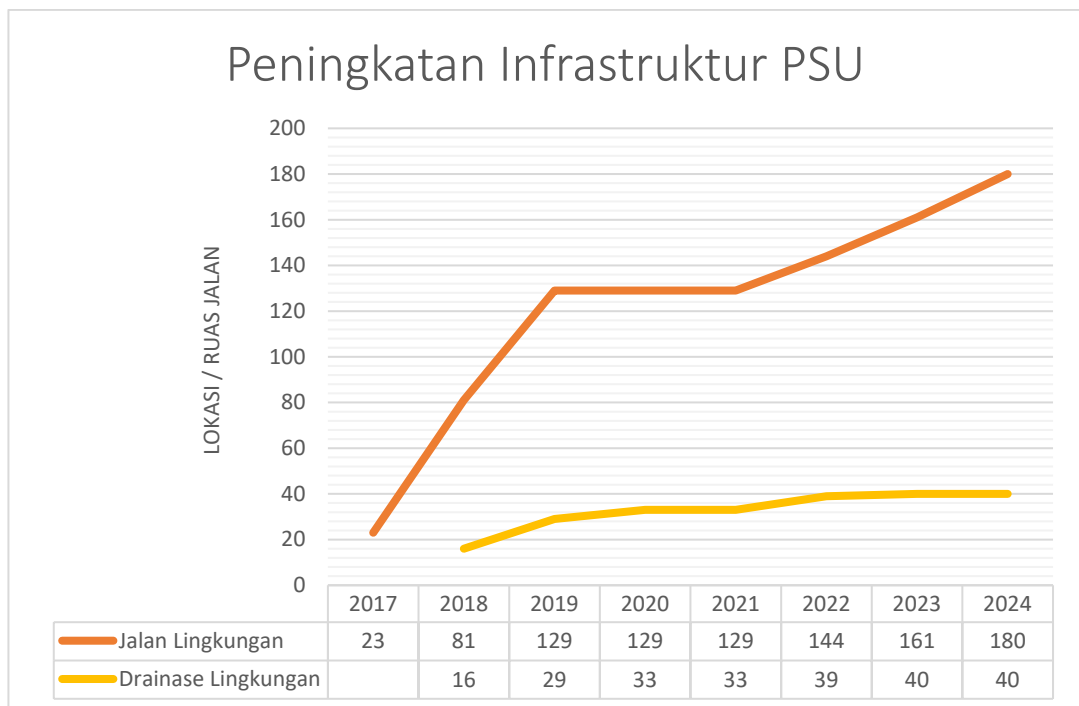
- Pembangunan Rumah Korban Bencana di Kota Dumai.

#### **4. Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU**

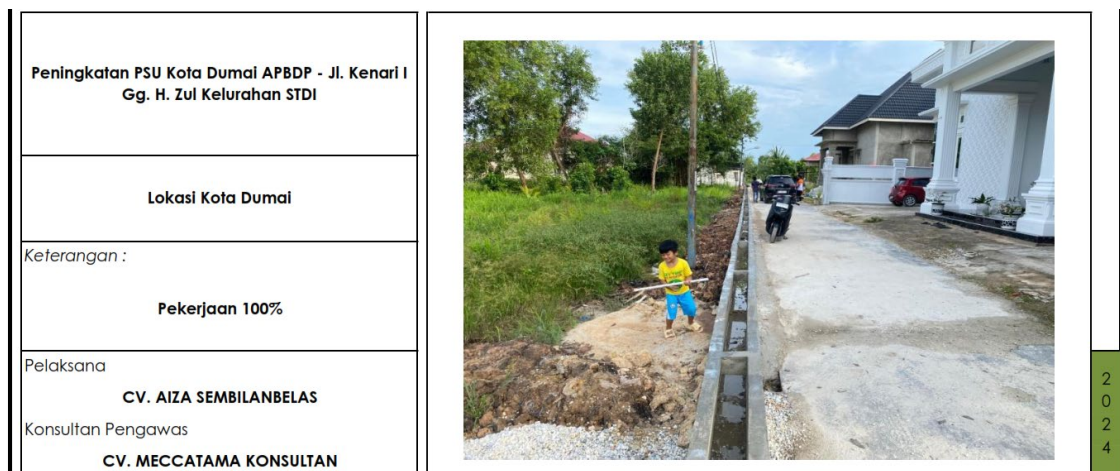
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 71,43%. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan IKU ini yakni:

$$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$$


Pada tahun 2024, Pada Variabel Jumlah lingkungan yang didukung PSU terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di sebanyak 19 Pekerjaan pada 18 Lokasi PSU Perumahan, dibagi dengan Jumlah lingkungan perumahan sebanyak 28 Perumahan yang direncanakan, sehingga realisasi terhadap target IKU sebesar 64,29%, tercapai 90% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil (sangat tinggi). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 50% atau tercapai sebesar 82%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 8%.




**Gambar 3.9** Grafik Peningkatan Infrastruktur PSU  
 Sumber: Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Dumai, 2024




**Gambar 3.10** Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Kenari I Gg. H. Zul, Kel. STDI  
 Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024

<p><b>Pemugaran Permukiman Kumuh - Jl. Hidayah Perumahan Fajar Indah Permai II Kel. Tanjung Palas</b></p>		2 0 2 4
<p><b>Lokasi Kota Dumai</b></p>		
<p>Keterangan :</p> <p><b>PHO</b></p>		
<p>Pelaksana  <b>CV. BERKAH SHAFIRA BALQIS</b>                  Konsultan  <b>CV. BASIT KONSULTAN</b></p>		

**Gambar 3.11** Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Hidayah Perumahan Fajar Indah Permai II, Kel. Tanjung Palas  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*

<p><b>Peningkatan PSU Kota Dumai APBDP - Jl. Samudra Gg. Pasifik I Kelurahan Purnama</b></p>		2 0 2 4
<p><b>Lokasi Kota Dumai</b></p>		
<p>Keterangan :</p> <p><b>Pekerjaan Pengecoran Beton</b></p>		
<p>Pelaksana  <b>CV. BERKAH SHAFIRA BALQIS</b>                  Konsultan Pengawas  <b>CV. MECCATAMA KONSULTAN</b></p>		

**Gambar 3.12** Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Samudra Gg. Pasifik I, Kel. Purnama  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*

<p><b>Peningkatan PSU Kota Dumai APBDP - Jl. Perumahan Sri Mersing Residence 4 Kelurahan Purnama</b></p>		2 0 2 4
<p><b>Lokasi Kota Dumai</b></p>		
<p>Keterangan :</p> <p><b>Melenur Bahan Aspal (Buras)</b></p>		
<p>Pelaksana  <b>CV. SARI DUMAI MANDIRI</b>                  Konsultan Pengawas  <b>CV. MECCATAMA KONSULTAN</b></p>		

**Gambar 3.13** Pembangunan PSU Kota Dumai Jl. Perumahan Sri Mersing Residence 4, Kel. Purnama  
*Sumber: Dokumentasi Dinas Perkim, 2024*



- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah sebagai berikut:
- Komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam melaksanakan Penyediaan PSU Perumahan;
  - Sumber daya yang memadai.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah sebagai berikut:
- Belum maksimalnya inventarisasi dan penyerahan Aset PSU Perumahan Oleh Developer kepada Pemerintah Kota Dumai, Sehingga terhambatnya penyediaan PSU yang Holistik terhadap perumahan yang belum memiliki PSU Perumahan.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU adalah sebagai berikut:
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan Penyusunan DED PSU sebagai acuan untuk membangun PSU Perumahan secara Holistik di tahun-tahun mendatang.



**Gambar 3.14** Dokumen Gambar Kerja Perspektif (DED) PSU Kota Dumai  
*Sumber: Arsip Dinas Perkim, 2024*

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan Percepatan penyerahan PSU Perumahan dari developer kepada Pemko dengan menginisiasi penerbitan Perwako Tentang serah terima Aset PSU Perumahan di Kota Dumai.

### 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6** Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman									
2	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	Meningkatnya kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	55,73	30,92	%	Rp3.996.460.212	Rp2.631.058.600,64	65,83%
		Menurunnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	45,50	45,50	%	Rp4.811.496.000	Rp2.335.325.084	48,54%

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
3	Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan	100	100	%	Rp525.922.400	Rp166.348.967	31,63%
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	71,43	64,29	%	Rp8.368.191.400	Rp6.785.273.094,50	81,08%
		Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	60	60	%	Rp97.000.000	Rp96.765.680	99,76%

### 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</i>	85,93	72,84
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	55,49	56,39
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100	31,63
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	90	81,30

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman tingkat efisiensinya adalah 1,17 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (85,93%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (72,84%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh tingkat efisiensinya adalah 0,98 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (55,49%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (56,39%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori KURANG EFISIEN;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota tingkat efisiensinya adalah 3,16 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (31,63%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

- d. Pada Indikator Kinerja Utama Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU tingkat efisiensinya adalah 1,10 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (90%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (81,30%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN.

### 3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan.

### B. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.8** Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
I	Belanja Operasi	14.868.003.191	10.136.579.888		
II	Belanja Modal	8.603.818.921	6.960.278.255		
III	Belanja Tidak Terduga	-	-		
IV	Belanja Transfer	-	-		
Jumlah		23.471.822.112	17.096.858.143	72,84	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.672.752.100	5.082.086.717	89,59	%
Indikator Program: Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.598.000	10.469.000	83,10	%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.000	4.649.000	73,81	%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.299.000	5.820.000	92,40	%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.146.083.600	2.934.060.372	93,26	%

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN			TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.784.600	2.927.761.372	93,25	%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.299.000	6.299.000	100,00	%
	<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.897.000</b>	<b>8.410.000</b>	<b>44,50</b>	<b>%</b>
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.299.000	1.550.000	24,61	%
	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.299.000	5.310.000	84,30	%
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.299.000	1.550.000	24,61	%
	<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55.000.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>48,18</b>	<b>%</b>
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000	26.500.000	48,18	%
	<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>531.448.240</b>	<b>479.661.894</b>	<b>90,26</b>	<b>%</b>
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.487.000	5.439.000	99,13	%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.103.100	47.503.300	66,81	%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	17.338.000	57,79	%
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.319.100	12.443.000	49,14	%
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	2.650.000	56,62	%
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.859.040	394.288.594	99,86	%
	<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>761.977.971</b>	<b>619.633.948</b>	<b>81,32</b>	<b>%</b>
	1	Pengadaan Mebel	59.828.400	58.100.000	97,11	%
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.686.400	116.330.000	45,86	%
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.463.171	445.203.948	99,27	%
	<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>792.543.964</b>	<b>704.951.400</b>	<b>88,95</b>	<b>%</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.877.500	1.800.000	36,90	%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	13.840.000	88,72	%
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.352.000	4.352.000	100,00	%
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.714.464	684.959.400	89,22	%

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>354.203.325</b>	<b>298.400.103</b>	<b>84,25</b>	<b>%</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.890.000	119.590.849	76,71	%
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000	39.862.528	89,44	%
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000	15.275.000	51,17	%
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.893.325	123.671.726	99,82	%
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>525.922.400</b>	<b>166.348.967</b>	<b>31,63</b>	<b>%</b>
	<b>Indikator Program: Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				
1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>176.464.000</b>	<b>40.288.967</b>	<b>22,83</b>	<b>%</b>
	1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	29.312.967	29,31	%
	2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	13.232.000	0	0,00	%
	3 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	13.232.000	0	0,00	%
	4 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-
	5 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	10.976.000	21,95	%
2	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>49.458.400</b>	<b>6.060.000</b>	<b>12,25</b>	<b>%</b>
	1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	49.458.400	6.060.000	12,25	%

URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
3	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	300.000.000	120.000.000	40,00	%
	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000	120.000.000	40,00	%
4	<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	-	-	-	-
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-	-	-	-
3	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	3.996.460.212	2.631.058.601	65,83	%
	<b>Indikator Program: Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani</b>				
1	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	514.560.000	256.171.682	49,78	%
	1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	407.560.000	255.419.682	62,67	%
	2 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.000.000	752.000	7,52	%
	3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	97.000.000	0	0,00	%
2	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	3.481.900.212	2.374.886.919	68,21	%
	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	768.668.012	439.138.532	57,13	%
	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	175.000.000	171.849.116	98,20	%
	3 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	29.972.200	20.883.500	69,68	%
	4 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	539.500.000	417.522.773	77,39	%
	5 Koordinasi dan SinPembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Hakronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.968.760.000	1.325.492.998	67,33	%



URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN		TARGET KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	SATUAN CAPAIAN
4	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	4.811.496.000	2.335.325.084	48,54	%
	Indikator Program: Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni				
	1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.811.496.000	2.335.325.084	48,54	%
	1 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.811.496.000	2.335.325.084	48,54	%
5	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	8.368.191.400	6.785.273.095	81,08	%
	Indikator Program: Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
	1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.368.191.400	6.785.273.095	81,08	%
	1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	94.000.000	5.166.500	5,50	%
	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.220.520.400	6.734.332.995	81,92	%
	3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	53.671.000	45.773.600	85,29	%
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	97.000.000	96.765.680	99,76	%
	Indikator Program: Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan				
	1 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	97.000.000	96.765.680	99,76	%
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	97.000.000	96.765.680	99,76	%

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam 1 (Satu) urusan pemerintahan dengan total 6 (Enam) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh 2 bidang yakni Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman serta Sekretariat. Pada Tahun 2024 anggaran yang teralokasi untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sebesar Rp. 23.471.822.112,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai, Banku Provinsi Riau dan DAK Integrasi telah terealisasi sebesar Rp 17.096.858.143 (*Tujuh belas miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah*) atau 72,84%.

1. Untuk IKU Luasan Permukiman Kumuh di tahun 2024 kawasan kumuh tertangani seluas 67,02 Ha sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 30,92% dengan capaian 55,49 % bernilai kinerja Cukup Berhasil.
2. Untuk indikator Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Berhasil.
3. Untuk IKU Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU terdapat pembangunan infrastruktur PSU (jalan dan drainase) di sebanyak 19 Pekerjaan pada 18 Lokasi PSU Perumahan, dibagi dengan Jumlah lingkungan perumahan sebanyak 28 Perumahan yang direncanakan, sehingga realisasi terhadap target IKU sebesar 90% dari 100% dengan nilai capaian sebesar 90% bernilai kinerja Sangat Berhasil.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2024 dapat dikatakan Berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala /hambatan dalam pelaksanaannya.

## **B. Langkah Perbaikan**

1. Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut.
3. Mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke pemda berjalan dengan sesuai aturan yang terarah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kewenangan dengan sumber dan APBN, DAK, APBD Provinsi.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada secara maksimal.
5. Meningkatkan upaya koordinasi program kegiatan yang melibatkan APBN dan Bankeu Prov agar kegiatan terlaksana sesuai peraturan perundangan.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 20 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI,**

**SUHERMAN, S.Sos**

Pembina Tingkat I/IV.b

NIP. 19680715 199903 1 003



# LAMPIRAN

# 1. Matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

## MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021 - 2026

VISI : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)  
MISI : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas  
SASARAN : Meningkatkan Infrastruktur Kota

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI		KEBIJAKAN	PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat pelayanan Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Rata-rata dari indikator sasaran (Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh + Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota + Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU)	n/a	33,33%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	Luas pemukiman kumuh yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh dikali 100%	0%	0%	11,37%	33,60%	55,73%	77,87%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan tertib administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>Menurunkan nilai delineaasi perumahan dan kawasan pemukiman kumuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan regulasi atau kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>Registrasi bagi orang atau badan yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Kawasan Permukiman</li> <li>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</li> </ul>			
											Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi dibagi jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu dikali 100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penyediaan bantuan rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</li> <li>Sosialisasi dan persiapan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</li> <li>Pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</li> <li>Serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Perumahan</li> </ul>		
										Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Jumlah lingkungan yang didukung PSU dibagi jumlah lingkungan perumahan dikali 100%	n/a	n/a	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penyediaan PSU perumahan</li> <li>Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> </ul>				

Dumai, Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI



## 2. Rencana Kinerja Tahun 2024

### RENCANA KINERJA TAHUN 2024 PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI

No.	KINERJA UTAMA			PROGRAM			ANGGARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<i>Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman</i>	<i>Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	%	75,72				
1	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	%	55,73	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	55,73%	Rp 3.996.460.212
					<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	45,50%	Rp 4.811.496.000
		2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	%	100	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Rp 525.922.400
		3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	71,43	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	71,43%	Rp 8.368.191.400
					<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	60%	Rp 97.000.000
						<b>Jumlah</b>	Rp 17.799.070.012	

Dumai, September 2024  
KEPALA,

**SUHERMAN, S.Sos**  
NIP. 19680715 199903 1 003

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



#### PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : SYAHRINALDI, S.Sos, M.Si  
**J a b a t a n** : PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya di sebut : **Pihak Pertama**

**N a m a** : H. PAISAL, SKM, MARS  
**J a b a t a n** : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.





Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI  
TAHUN 2024**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	75,72
		1 Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	55,73
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	2 Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100
		3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	71,43

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 680.000.000	
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 3.857.440.212	
3.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp. 1.600.000.000	
4.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp. 1.843.296.250	
5.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 100.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	Pendukung







## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Syahrinaldi, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Syahrinaldi, S.Sos, M.Si

NIP. 19680715 199903 1 003

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100

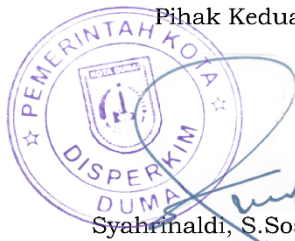
Program	Anggaran
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 5.772.211.700</b>
➤ <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 12.598.000</b>
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.299.000
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.299.000
➤ <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 3.531.393.800</b>
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.525.094.800
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.299.000
➤ <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 18.897.000</b>
• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 6.299.000
• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
➤ <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 55.000.000</b>
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 55.000.000
➤ <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 436.589.200</b>
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.487.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 71.103.100
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 30.000.000
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.319.100
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4.680.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 300.000.000
➤ <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 529.177.371</b>
• Pengadaan Mebel	Rp 59.828.400
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 130.885.800
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 338.463.171
➤ <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 815.793.004</b>
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.877.500
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.500.000
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 53.420.000
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 746.995.504

Program	Anggaran
➤ <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 372.763.325</b>
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 189.450.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 44.570.000
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 29.850.000
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 108.893.325
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.672.752.100</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Syahrialdi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19680715 199903 1 003

Wahyudi, S.Sos  
NIP. 19760518 201001 1 010



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharyadi, ST  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Wahyudi, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Suharyadi, ST

NIP. 19790919 201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2
		2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4
		3. Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	24

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 55.000.000</b>
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 55.000.000
<b>2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 815.793.004</b>
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.877.500
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 10.500.000
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 53.420.000
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 746.995.504
<b>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 372.763.325</b>
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 189.450.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 44.570.000
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 29.850.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.243.556.329</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Wahyudi, S.Sos

Suharyadi, ST

NIP. 19760518 201001 1 010

NIP. 19790919 201001 1 017



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustiarita, M.IP

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Yustiarita, M.IP

NIP. 19730702 200003 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7
		2. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	6

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 12.598.000</b>
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.299.000
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.299.000
<b>2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 18.897.000</b>
• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 6.299.000
• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 31.495.000</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Wahyudi, S.Sos

Yustiarita, M.IP

NIP. 19760518 201001 1 010

NIP. 19730702 200003 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar, S.Sos, M.Si

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Iskandar, S.Sos, M.Si

NIP. 19800102 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	2
		2. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	2
		3. Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	35
		4. Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 3.531.393.800</b>
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.525.094.800
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.299.000
<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 436.589.200</b>
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.487.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 71.103.100
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 30.000.000
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.319.100
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4.680.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 300.000.000
<b>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 529.177.371</b>
• Pengadaan Mebel	Rp 59.828.400
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 130.885.800
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 338.463.171
<b>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 108.893.325</b>
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 108.893.325
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.606.053.696</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,



Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Pihak Pertama



Iskandar, S.Sos, M.Si

NIP. 19800102 200604 1 016



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharni, ST  
Jabatan : Analis Bangunan dan Perumahan

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suharyadi, ST  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suharyadi, ST

NIP. 19790919 201001 1 017

Suharni, ST

NIP. 19840110 201001 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25
		2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
		3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25
		4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		5. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
		6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1
		7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
		8. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8
		9. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5
		10. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Suharyadi, ST



Suharni, ST

NIP. 19790919 201001 1 017

NIP. 19840110 201001 2 032



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hilman Rifqi, ST  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Yustiarita, M.IP  
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Yustiarita, M.IP

NIP. 19730702 200003 2 002

Muhammad Hilman Rifqi, ST

NIP. 19940112 201902 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4
		3. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
		4. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2
		5. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Yustiarita, M.IP

NIP. 19730702 200003 2 002

Muhammad Hilman Rifqi, ST

NIP. 19940112 201902 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Syahrinaldi, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Syahrinaldi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19680715 199903 1 003

Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100
		2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	55,73
		3. Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	%	45,50
		4. Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) <i>(Kegiatan Pemakaman)</i>	%	71,43

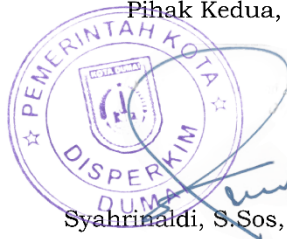
Program	Anggaran
<b>1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rp 680.000.000</b>
➤ <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 290.000.000</b>
• Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 100.000.000
• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 20.000.000
• Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 20.000.000
• Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000
• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000
➤ <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 40.000.000</b>
• Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp 40.000.000
➤ <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
• Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 300.000.000
➤ <b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	<b>Rp 50.000.000</b>
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Rp 50.000.000
<b>2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp 2.745.468.012</b>
➤ <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 163.000.000</b>
• Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 163.000.000

Program	Anggaran
➤ <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 2.582.468.012</b>
• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 1.334.968.012
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 1.247.500.000
<b>3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Rp 1.600.000.000</b>
➤ <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 1.600.000.000</b>
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 1.600.000.000
<b>4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Rp 241.800.000</b>
➤ <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Rp 241.800.000</b>
• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )	Rp 241.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.267.268.012</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Syahrinaldi, S.Sos, M.Si

NIP. 19680715 199903 1 003

Suprpto, ST, MT

NIP. 19790606 200112 1 001





#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miwira Delda Friska, ST, M.Si  
Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

Miwira Delda Friska, ST, M.Si

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19820505 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Dokumen	4
		2. Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	2
		3. Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Unit Rumah	150

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 270.000.000</b>
• Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 100.000.000
• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 20.000.000
• Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000
• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000
<b>2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 163.000.000</b>
• Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 163.000.000
<b>3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 1.600.000.000</b>
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 1.600.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.033.000.000</b>

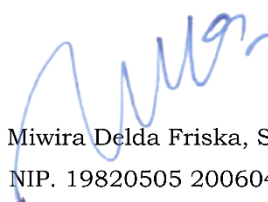
Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001



Miwira Delda Friska, ST, M.Si  
NIP. 19820505 200604 2 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Suwandi, ST  
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

Indra Suwandi, ST

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19710601 200212 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	10
		2. Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	120,79
		3. Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )	Lokasi	1

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
• Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 300.000.000
<b>2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 2.582.468.012</b>
• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 1.334.968.012
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 1.247.500.000
<b>3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Rp 241.800.000</b>
• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )	Rp 241.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.124.268.012</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

  
Suprpto, ST, MT

NIP. 19790606 200112 1 001

  
Indra Suwandi, ST

NIP. 19710601 200212 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Mezi, ST  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

Diana Mezi, ST

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19930127 201902 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Dokumen	1
		2. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	50

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 20.000.000</b>
• Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 20.000.000
<b>2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 40.000.000</b>
• Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp 40.000.000
<b>3. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	<b>Rp 50.000.000</b>
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rp 50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.000.000</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Suprpto, ST, MT

Diana Mezi, ST

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19930127 201902 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslim  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

Muslim

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19690910 200801 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )	Lokasi	1

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (*Kegiatan Pemakaman*)

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Suprpto, ST, MT

Muslim

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19690910 200801 1 021





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmah Wati, S.IP

Jabatan : Analis Perencanaan

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

Salmah Wati, S.IP

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19910825 202012 2 020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25
		2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
		3. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
		4. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2
		5. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

**Sub Kegiatan**

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Suprpto, ST, MT

Salmah Wati, S.IP

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19910825 202012 2 020



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hardianti, ST  
Jabatan : Analis Bangunan dan Perumahan

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Suprpto, ST, MT

NIP. 19790606 200112 1 001

Pihak Pertama

Sri Hardianti, ST

NIP. 19960701 202012 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,



Suprpto, ST, MT

NIP. 19790606 200112 1 001

Pihak Pertama



Sri Hardianti, ST

NIP. 19960701 202012 2 015



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Syahrinaldi, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

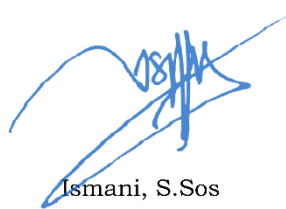
Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Syahrinaldi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19680715 199903 1 003



Ismani, S.Sos  
NIP. 19821111 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

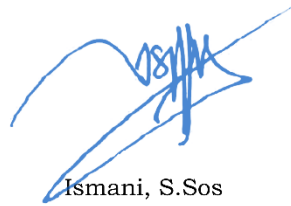
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	55,73
		2. Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	71,43
		3. Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	60

Program	Anggaran
<b>1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp 1.111.972.200</b>
➤ <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 357.000.000</b>
• Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 247.000.000
• Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp 10.000.000
• Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rp 100.000.000
➤ <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 754.972.200</b>
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 175.000.000
• Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 29.972.200
• Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 550.000.000
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Rp 1.601.496.250</b>
➤ <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Rp 1.601.496.250</b>
• Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 94.000.000
• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 1.461.996.250
• Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp 45.500.000
<b>3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp 100.000.000</b>
➤ <b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>	<b>Rp 100.000.000</b>
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Rp 100.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.813.468.450</b>

Dumai, Januari 2024

Pihak Pertama



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



Pihak Kedua,

Syahrinaldi, S.Sos, M.Si

NIP. 19680715 199903 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Finaldi, ST, M.Soc.Sc  
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003

Finaldi, ST, M.Soc.Sc

NIP. 19731128 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	2
		2. Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	120,79
		3. Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Lokasi	20
		4. Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Laporan	1

Kegiatan

**1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

**2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

**3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

**4. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, Januari 2024

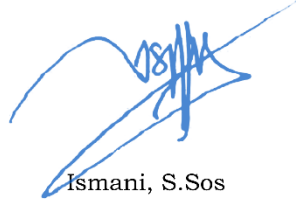
Pihak Pertama



Finaldi, ST, M.Soc.Sc

NIP. 19731128 200112 1 002

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfikar, SE  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003

Zulfikar, SE

NIP. 19771231 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	2
		2. Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	120,79
		3. Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Lokasi	20
		4. Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Laporan	1

Kegiatan

**1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

**2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

**3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

**4. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, Januari 2024

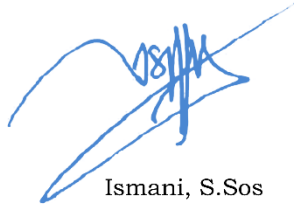
Pihak Pertama



Zulfikar, SE

NIP. 19771231 200502 1 002

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serly Listiyanti, S.Ars  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



Serly Listiyanti, S.Ars

NIP. 19870303 201902 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
		2. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	1
		3. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2
		5. Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1
		6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	120,79
		7. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
		8. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	20
		9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2
		10. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1

Sub Kegiatan

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, Januari 2024

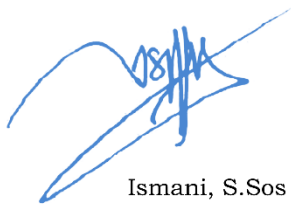
Pihak Pertama



Serly Listiyanti, S.Ars

NIP. 19870303 201902 2 005

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirya Saputra, ST  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

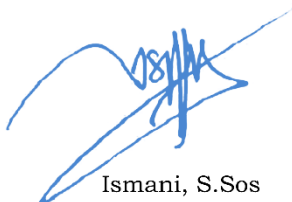
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Ismani, S.Sos  
NIP. 19821111 200701 1 003



Wirya Saputra, ST  
NIP. 19880525 201902 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
		2. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	1
		3. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2
		5. Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1
		6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	120,79
		7. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
		8. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	20
		9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2
		10. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1

Sub Kegiatan

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, Januari 2024

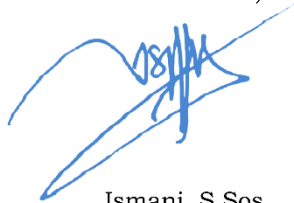
Pihak Pertama



Wiry Saputra, ST

NIP. 19880525 201902 1 004

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrizal  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003

Afrizal

NIP. 19730226 200801 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
		2. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	1
		3. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2
		5. Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1
		6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	120,79
		7. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
		8. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	20
		9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2
		10. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1

Sub Kegiatan

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, Januari 2024

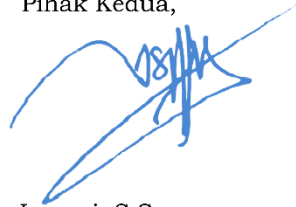
Pihak Pertama



Afrizal

NIP. 19730226 200801 1 009

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003

#### 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta Lampiran Perubahan



##### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suherman, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : H. Paisal, SKM, MARS

Jabatan : Wali Kota Dumai

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 23 September 2024

Pihak Kedua,



H. Paisal, SKM, MARS

Pihak Pertama




Suherman, S.Sos

NIP. 19680715 199903 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	➤ Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	75,72%
2.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program kabupaten/kota	✓ Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	55,73%
		✓ Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	100%
		✓ Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	71,43%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pengembangan perumahan	Rp 525.922.400,00	
2. Program kawasan permukiman	Rp 3.996.460.212,00	
3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Rp 4.811.496.000,00	
4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Rp 8.368.191.400,00	
5. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Rp 97.000.000,00	
6. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Pendukung

Pihak Kedua,  
  
H. Paisal, SKM, MARS

Dumai, 23 September 2024  
Pihak Pertama  
  
Suherman, S.Sos  
NIP. 19680715 199903 1 003





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suherman, S.Sos

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suherman, S.Sos

NIP. 19680715 199903 1 003

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100

Program	Anggaran
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 5.672.752.100</b>
➤ <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 12.598.000</b>
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.299.000
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.299.000
➤ <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 3.146.083.600</b>
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.139.784.600
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.299.000
➤ <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 18.897.000</b>
• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 6.299.000
• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
➤ <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 55.000.000</b>
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 55.000.000
➤ <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 531.448.240</b>
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.487.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 71.103.100
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 30.000.000
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.319.100
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4.680.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 394.859.040
➤ <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 761.977.971</b>
• Pengadaan Mebel	Rp 59.828.400
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 253.686.400
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 448.463.171
➤ <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 792.543.964</b>
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.877.500
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 15.600.000
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.352.000
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 767.714.464

Program	Anggaran
➤ <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 354.203.325</b>
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 155.890.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 44.570.000
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 29.850.000
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 123.893.325
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.672.752.100</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Suherman, S.Sos

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19680715 199903 1 003

NIP. 19760518 201001 1 010



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suherman, S.Sos  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suherman, S.Sos  
NIP. 19680715 199903 1 003

Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100
		2. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	55,73
		3. Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	%	45,50
		4. Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Kegiatan Pemakaman)	%	71,43

Program	Anggaran
<b>1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rp 525.922.400</b>
> <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 176.464.000</b>
• Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 100.000.000
• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 13.232.000
• Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 13.232.000
• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000
> <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 49.458.400</b>
• Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp 49.458.400
> <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
• Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 300.000.000
<b>2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp 2.900.428.012</b>
> <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 163.000.000</b>
• Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 163.000.000
> <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 2.737.428.012</b>
• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 768.668.012
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 1.968.760.000



Program	Anggaran
<b>3. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Rp 4.811.496.000</b>
> Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp 4.811.496.000</b>
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 4.811.496.000
<b>4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Rp 249.300.000</b>
> <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Rp 249.300.000</b>
• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ( <i>Kegiatan Pemukiman</i> )	Rp 249.300.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.487.146.412</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suherman, S.Sos

Suprpto, ST, MT

NIP. 19680715 199903 1 003

NIP. 19790606 200112 1 001



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suherman, S.Sos  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suherman, S.Sos

Ismani, S.Sos

NIP. 19680715 199903 1 003

NIP. 19821111 200701 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	55,73
		2. Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	71,43
		3. Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	60

Program	Anggaran
<b>1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp 1.096.032.200</b>
> <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 351.560.000</b>
• Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 244.560.000
• Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp 10.000.000
• Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rp 97.000.000
> <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 744.472.200</b>
• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 175.000.000
• Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 29.972.200
• Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 539.500.000
<b>2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Rp 8.118.891.400</b>
> <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Rp 8.118.891.400</b>
• Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 94.000.000
• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 7.971.220.400
• Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp 53.671.000
<b>3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Rp 97.000.000</b>
> <b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>	<b>Rp 97.000.000</b>
• Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Rp 97.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9.311.923.600</b>



Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Suherman, S.Sos

NIP. 19680715 199903 1 003



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharyadi, ST  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Wahyudi, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Suharyadi, ST

NIP. 19790919 201001 1 017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2
		2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4
		3. Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	24

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 55.000.000</b>
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 55.000.000
<b>2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 792.543.964</b>
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.877.500
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 15.600.000
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.352.000
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 767.714.464
<b>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 230.310.000</b>
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 155.890.000
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 44.570.000
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 29.850.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.077.853.964</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

  
Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

  
Suharyadi, ST

NIP. 19790919 201001 1 017



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustiarita, M.IP

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Wahyudi, S.Sos

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Yustiarita, M.IP

NIP. 19730702 200003 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	7
		2. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	6

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 12.598.000</b>
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.299.000
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.299.000
<b>2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 18.897.000</b>
• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 6.299.000
• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 6.299.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 31.495.000</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010



Yustiana, M.IP

NIP. 19730702 200003 2 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Wahyudi, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos

NIP. 19760518 201001 1 010

Iskandar, S.Sos, M.Si

NIP. 19800102 200604 1 016



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

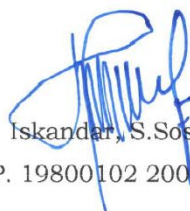
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	2
		2. Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	2
		3. Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	35
		4. Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 3.146.083.600</b>
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.139.784.600
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.299.000
<b>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 531.448.240</b>
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.487.000
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 71.103.100
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 30.000.000
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 25.319.100
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4.680.000
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 394.859.040
<b>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp 761.977.971</b>
• Pengadaan Mebel	Rp 59.828.400
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 253.686.400
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 448.463.171
<b>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 123.893.325</b>
• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 123.893.325
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.563.403.136</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Wahyudi, S.Sos  
NIP. 19760518 201001 1 010

Iskandar, S.Sos, M.Si  
NIP. 19800102 200604 1 016



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suharni, ST  
Jabatan : Analis Bangunan dan Perumahan

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suharyadi, ST  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suharyadi, ST

NIP. 19790919 201001 1 017

Suharni, ST

NIP. 19840110 201001 2 032



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25
		2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
		3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25
		4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		5. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
		6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1
		7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
		8. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8
		9. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5
		10. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dumai, September 2024

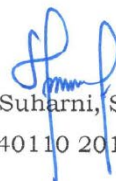
Pihak Pertama

Pihak Kedua,



Suharyadi, ST

NIP. 19790919 201001 1 017



Suharni, ST

NIP. 19840110 201001 2 032



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hilman Rifqi, ST  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Yustiarita, M.IP  
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Yustiarita, M.IP  
NIP. 19730702 200003 2 002

Muhammad Hilman Rifqi, ST  
NIP. 19940112 201902 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4
		3. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
		4. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2
		5. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Yustiarita, M.IP  
NIP. 19730702 200003 2 002

Muhammad Hilman Rifqi, ST  
NIP. 19940112 201902 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miwira Delda Friska, ST, M.Si

Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

Dumai, September 2024

Pihak Pertama

Miwira Delda Friska, ST, M.Si  
NIP. 19820505 200604 2 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Dokumen	4
		2. Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	2
		3. Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Unit Rumah	150

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 163.232.000</b>
• Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 100.000.000
• Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp 13.232.000
• Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000
<b>2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 163.000.000</b>
• Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp 163.000.000
<b>3. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 4.811.496.000</b>
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 4.811.496.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 5.137.728.000</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

Miwira Delda Friska, ST, M.Si  
NIP. 19820505 200604 2 011





## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Suwandi, ST  
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

Indra Suwandi, ST  
NIP. 19710601 200212 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	10
2. Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		Ha	120,79	
3. Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )		Lokasi	1	

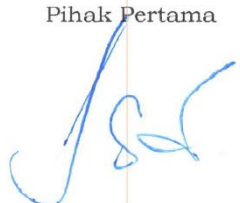
Kegiatan	Anggaran
<b>1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 300.000.000</b>
• Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 300.000.000
<b>2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Rp 2.737.428.012</b>
• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 768.668.012
• Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 1.968.760.000
<b>3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Rp 249.300.000</b>
• Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )	Rp 249.300.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.286.728.012</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

  
Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

  
Indra Suwandi, ST  
NIP. 19710601 200212 1 006



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Mezi, ST

Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

Diana Mezi, ST

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19930127 201902 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Dokumen	1
		2. Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	50

Kegiatan	Anggaran
<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 13.232.000</b>
• Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 13.232.000
<b>2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 49.458.400</b>
• Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp 49.458.400
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 62.690.400</b>

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama




Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

Diana Mezi, ST  
NIP. 19930127 201902 2 003



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslim  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dumai, September 2024

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

NIP. 19790606 200112 1 001

Muslim

NIP. 19690910 200801 1 021

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian ( <i>Kegiatan Pemakaman</i> )	Lokasi	1

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (*Kegiatan Pemakaman*)

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Suprpto, ST, MT

Muslim

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19690910 200801 1 021



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salmah Wati, S.IP  
Jabatan : Analis Perencanaan

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

Salmah Wati, S.IP  
NIP. 19910825 202012 2 020

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25
		2. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2
		3. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2
		4. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2
		5. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

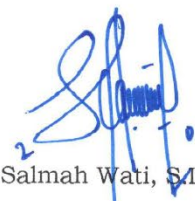
Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT  
NIP. 19790606 200112 1 001

Salmah Wati, SIP  
NIP. 19910825 202012 2 020



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hardianti, ST  
Jabatan : Analis Bangunan dan Perumahan

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Suprpto, ST, MT  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan Rakyat

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Suprpto, ST, MT

NIP. 19790606 200112 1 001

Sri Hardianti, ST

NIP. 19960701 202012 2 015



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
		2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Suprpto, ST, MT

Sri Hardianti, ST

NIP. 19790606 200112 1 001

NIP. 19960701 202012 2 015



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Finaldi, ST, M.Soc.Sc  
Jabatan : Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

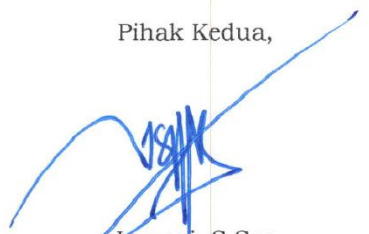
Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Ismani, S.Sos  
NIP. 19821111 200701 1 003

Dumai, September 2024

Pihak Pertama

  
Finaldi, ST, M.Soc.Sc  
NIP. 19731128 200112 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	2
		2. Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	120,79
		3. Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Lokasi	20
		4. Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Laporan	1

Kegiatan

- 1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**
  - Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
  - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
  - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
- 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
  - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
  - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- 3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**
  - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
  - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- 4. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, September 2024

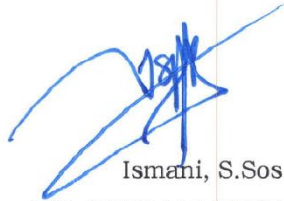
Pihak Pertama



Finaldi, ST, M.Soc.Sc

NIP. 19731128 200112 1 002

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfikar, SE  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003

Zulfikar, SE

NIP. 19771231 200502 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen	2
		2. Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Ha	120,79
		3. Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Lokasi	20
		4. Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Laporan	1

Kegiatan

**1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

**2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

**3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

**4. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, September 2024

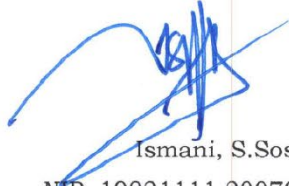
Pihak Pertama



Zulfikar, SE

NIP. 19771231 200502 1 002

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serly Listiyanti, S.Ars  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

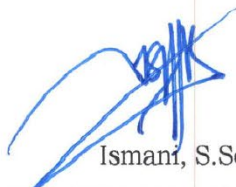
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



Serly Listiyanti, S.Ars

NIP. 19870303 201902 2 005



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
		2. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	1
		3. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2
		5. Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1
		6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	120,79
		7. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
		8. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	20
		9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2
		10. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1

Sub Kegiatan

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil



Dumai, September 2024

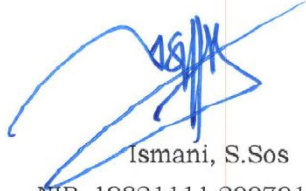
Pihak Pertama



Serly Listiyanti, S.Ars

NIP. 19870303 201902 2 005

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirya Saputra, ST  
Jabatan : Analis Bangunan Gedung dan Permukiman  
Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003

Pihak Pertama

Wirya Saputra, ST

NIP. 19880525 201902 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
		2. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	1
		3. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2
		5. Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1
		6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	120,79
		7. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
		8. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	20
		9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2
		10. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1


Sub Kegiatan

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Ismani, S.Sos  
NIP. 19821111 200701 1 003



Wirya Saputra, ST  
NIP. 19880525 201902 1 004



#### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrizal  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Ismani, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

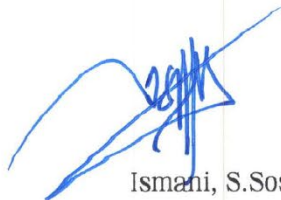
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



Afrizal

NIP. 19730226 200801 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota	1. Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2
		2. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	1
		3. Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	100
		4. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	2
		5. Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1
		6. Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	120,79
		7. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1
		8. Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	20
		9. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2
		10. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	1

Sub Kegiatan

1. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
7. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
8. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Dumai, September 2024

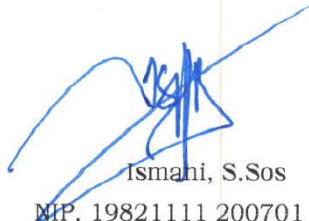
Pihak Pertama



Afrizal

NIP. 19730226 200801 1 009

Pihak Kedua,



Ismani, S.Sos

NIP. 19821111 200701 1 003



## 5. Pengukuran Kinerja

### PENGUKURAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai  
Tahun Anggaran : 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus	Target	Realisasi	Capaian 2024
1.	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman	Tingkat pelayanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	$\frac{\text{Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh} + \text{Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota} + \text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU}}{3}$	75,72%	65,07%	85,93%
2.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	$\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$	55,73%	30,92%	55,49%
		Persentase penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$	100%	100,00%	100,00%
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$	71,43%	64,29%	90,00%

Pagu Anggaran Program Tahun 2024 : Rp23.471.822.112  
Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp17.096.858.143  
Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 72,84%

Dumai, Januari 2025  
**KEPALA,**

**SUHERMAN, S.Sos**  
NIP. 19680715 199903 1 003

## 6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.672.752.100</b>	<b>5.082.086.716,82</b>	<b>100%</b>	<b>89,59%</b>	<b>590.665.383,18</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.598.000</b>	<b>10.469.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>83,10%</b>	<b>2.129.000,00</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.299.000	4.649.000,00	100%	73,81%	1.650.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.299.000	5.820.000,00	100%	92,40%	479.000,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.146.083.600</b>	<b>2.934.060.372,00</b>	<b>100%</b>	<b>93,26%</b>	<b>212.023.228,00</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.139.784.600	2.927.761.372,00	100%	93,25%	212.023.228,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.299.000	6.299.000,00	100%	100,00%	-
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.897.000</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>44,50%</b>	<b>10.487.000,00</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.299.000	1.550.000,00	100%	24,61%	4.749.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.299.000	5.310.000,00	100%	84,30%	989.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.299.000	1.550.000,00	100%	24,61%	4.749.000,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55.000.000</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>48,18%</b>	<b>28.500.000,00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000	26.500.000,00	100%	48,18%	28.500.000,00
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>531.448.240</b>	<b>479.661.894,00</b>	<b>100%</b>	<b>90,26%</b>	<b>51.786.346,00</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.487.000	5.439.000,00	100%	99,13%	48.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.103.100	47.503.300,00	100%	66,81%	23.599.800,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	17.338.000,00	100%	57,79%	12.662.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.319.100	12.443.000,00	100%	49,14%	12.876.100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	2.650.000,00	100%	56,62%	2.030.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.859.040	394.288.594,00	100%	99,86%	570.446,00
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>761.977.971</b>	<b>619.633.948,12</b>	<b>100%</b>	<b>81,32%</b>	<b>142.344.022,88</b>
	Pengadaan Mebel	59.828.400	58.100.000,00	100%	97,11%	1.728.400,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.686.400	116.330.000,00	100%	45,86%	137.356.400,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.463.171	445.203.948,12	100%	99,27%	3.259.222,88
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>792.543.964</b>	<b>704.951.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>88,95%</b>	<b>87.592.564,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.877.500	1.800.000,00	100%	36,90%	3.077.500,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	13.840.000,00	100%	88,72%	1.760.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.352.000	4.352.000,00	100%	100,00%	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.714.464	684.959.400,00	100%	89,22%	82.755.064,00
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>354.203.325</b>	<b>298.400.102,70</b>	<b>100%</b>	<b>84,25%</b>	<b>55.803.222,30</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.890.000	119.590.849,00	100%	76,71%	36.299.151,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.570.000	39.862.528,00	100%	89,44%	4.707.472,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.850.000	15.275.000,00	100%	51,17%	14.575.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.893.325	123.671.725,70	100%	99,82%	221.599,30

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>525.922.400</b>	<b>166.348.967,00</b>	<b>100%</b>	<b>31,63%</b>	<b>359.573.433,00</b>
<b>9</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>176.464.000</b>	<b>40.288.967,00</b>	<b>100%</b>	<b>22,83%</b>	<b>136.175.033,00</b>
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000	29.312.967,00	100%	29,31%	70.687.033,00
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	13.232.000	-	100%	0,00%	13.232.000,00
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	13.232.000	-	100%	0,00%	13.232.000,00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	10.976.000,00	100%	21,95%	39.024.000,00
<b>10</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>49.458.400</b>	<b>6.060.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12,25%</b>	<b>43.398.400,00</b>
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	49.458.400	6.060.000,00	100%	12,25%	43.398.400,00
<b>11</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>300.000.000</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>40,00%</b>	<b>180.000.000,00</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000	120.000.000,00	100%	40,00%	180.000.000,00
<b>12</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>3.996.460.212</b>	<b>2.631.058.600,64</b>	<b>100%</b>	<b>65,83%</b>	<b>1.365.401.611,36</b>
<b>13</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>514.560.000</b>	<b>256.171.682,00</b>	<b>100%</b>	<b>49,78%</b>	<b>258.388.318,00</b>
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	407.560.000	255.419.682,00	100%	62,67%	152.140.318,00
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	10.000.000	752.000,00	100%	7,52%	9.248.000,00
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	97.000.000	-	100%	0,00%	97.000.000,00
<b>14</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>3.481.900.212</b>	<b>2.374.886.918,64</b>	<b>100%</b>	<b>68,21%</b>	<b>1.107.013.293,36</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	768.668.012	439.138.532,00	100%	57,13%	329.529.480,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	175.000.000	171.849.116,00	100%	98,20%	3.150.884,00
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	29.972.200	20.883.500,00	100%	69,68%	9.088.700,00
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	539.500.000	417.522.772,64	100%	77,39%	121.977.227,36
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.968.760.000	1.325.492.998,00	100%	67,33%	643.267.002,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>4.811.496.000</b>	<b>2.335.325.084,00</b>	<b>100%</b>	<b>48,54%</b>	<b>2.476.170.916,00</b>
<b>15</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.811.496.000</b>	<b>2.335.325.084,00</b>	<b>100%</b>	<b>48,54%</b>	<b>2.476.170.916,00</b>
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4.811.496.000	2.335.325.084,00	100%	48,54%	2.476.170.916,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN	% FISIK	% KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>8.368.191.400</b>	<b>6.785.273.094,50</b>	<b>100%</b>	<b>81,08%</b>	<b>1.582.918.305,50</b>
16	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>8.368.191.400</b>	<b>6.785.273.094,50</b>	<b>100%</b>	<b>81,08%</b>	<b>1.582.918.305,50</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	94.000.000	5.166.500,00	100%	5,50%	88.833.500,00
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.220.520.400	6.734.332.994,50	100%	81,92%	1.486.187.405,50
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	53.671.000	45.773.600,00	100%	85,29%	7.897.400,00
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>97.000.000</b>	<b>96.765.680,00</b>	<b>100%</b>	<b>99,76%</b>	<b>234.320,00</b>
17	<b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b>	<b>97.000.000</b>	<b>96.765.680,00</b>	<b>100%</b>	<b>99,76%</b>	<b>234.320,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	97.000.000	96.765.680,00	100%	99,76%	234.320,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.471.822.112</b>	<b>17.096.858.143</b>	<b>100%</b>	<b>72,84%</b>	<b>6.374.963.969,04</b>

Dumai, Januari 2025

**KEPALA,**

**SUHERMAN, S.Sos**

NIP. 19680715 199903 1 003